

Koordinasi PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY MANDAU KOMPLEK Dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Bengkalis

Ridho Oktaviandi¹ Herman²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
ridhooktaviandi@student.uir.ac.id herman@soc.uir.ac.id

Received : February 29, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

Coordination is a matter of organizing an organization or activity so that the regulations and actions to be implemented do not conflict with each other or are confused. Bengkalis Regency is an area where there are many companies that implement TJSP. In an effort to support the achievement and acceleration of regional development, in the acceleration and expansion of regional development, the role of the private sector is very necessary because development is currently not only the responsibility of the government but is also the responsibility and duty of all parties, both the business world, the world of work and society. There is a need for coordination between PT. Adei Plantation and Industry and the Bengkalis Regency Corporate Social Responsibility Forum. This research aims to analyze the communication process of PT. Adei Plantation and Industry with the Bengkalis Regency Corporate Social Responsibility Forum in implementing TJSP in Bengkalis Regency. So the research results show that the coordination of PT. Adei Plantation and Industry with the Bengkalis Regency Corporate Social Responsibility Forum has not been running optimally. This is caused by several obstacles, namely the absence of regulations/regulations that require companies to coordinate with the Corporate Social Responsibility Forum, the absence of sitting together between companies and the community in creating TJSP programs and the lack of exposure to TJSP activities carried out by the Social Responsibility Forum. Company.

Keywords: *Coordination, Forums TJSP, Companies, PT. Adei Plantation and Industry*

Abstrak

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Kabupaten Bengkalis adalah daerah yang di dalam nya banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang melaksanakan TJSP. Dalam upaya mendukung pencapaian dan percepatan pembangunan daerah, bahwa dalam percepatan dan perluasan pembangunan daerah, peran swasta sangatlah diperlukan karena pembangunan saat ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata namun juga menjadi tanggung jawab dan tugas semua pihak, baik dunia usaha, dunia kerja maupun masyarakat. Perlu nya koordinasi PT. Adei Plantation and Industry dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi PT. Adei Plantation and Industry dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan TJSP di Kabupaten BengkalisHal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu belum ada regulasi/peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk berkoordinasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, tidak adanya duduk bersama antara perusahaan dan masyarakat dalam pembuatan program-program TJSP dan kurangnya expose kegiatan TJSP yang dilakukan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kata kunci : *Koordinasi, Forum TJSP, Perusahaan, PT. Adei Plantation and Industry.*

Pendahuluan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada bab V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT terdapat 2 (dua) kriteria sektor kegiatan yang mewajibkan Perusahaan untuk melaksanakan TJSP tersebut, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam
2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Sebuah perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam didefinisikan sebagai perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sebuah perusahaan yang tidak menjalankan dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada kemampuan sumber daya alam untuk berfungsi.

Tujuan dari Pasal 74 UUPT adalah untuk memastikan bahwa hubungan antara Perseroan tetap serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya lokal.

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan ini adalah tanggung jawab yang ditanggung oleh perusahaan dan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab ini dilakukan dengan adil dan wajar.

Peraturan-peraturan mengenai TJSP selain diatur dalam Pasal 74 UUPT juga diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pada UUPM resiko hukum bagi Perseroan yang tidak melaksanakan TJSP diatur dalam Pasal 34 UUPM yaitu dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sedangkan, dalam UUPT ketentuan sanksi bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSP tidak diatur secara spesifik, melainkan diserahkan dan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseorangan dimana untuk melaksanakannya harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseorangan terbatas yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam hal perseorangan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseorangan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga disebutkan dalam UUPT pada pasal 1 ayat 3, yaitu:

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseorangan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat, baik bagi perseorangan sendiri, komunitas setempat maupun pada umumnya.

Dalam PP No. 47 tahun 2012 ditegaskan juga bahwa dalam pasal 3 “tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseorangan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.

Berdasarkan pemaham di atas bahwa perseorangan yang memamfaatkan atau melakukan usahanya dibidang atau maupun memafaatkan sumberdaya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana tujuan dari TJSL ini adalah untuk tetap melindungi berkelanjutan ekonomi dan berkelanjutan lingkungan, baik masyarakat ataupun lingkungan.

Perda Provinsi Riau No 6 tahun 2012 BAB V pasal 7 mengenai Hak dan Kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak:

1. Menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan
2. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima mamfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
3. Mendapatkan fasilitas dan/tau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang paling bertanggung jawab kepada kebijakan pemerintah, karena dengan adanya kebijakan pemerintah akan berwewenang dengan memproses kebijakan otoritas pemerintah sedangkan kebijakan publiknya akan berwewenang dengan kebijakan pemerintah lokal.

Perda Kabupaten Bengkalis No 9 tahun 2019 BAB III mengenai Forum TJSP dibentuk untuk :

1. Membantu Bupati dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSP
2. Membantu dan memfasilitasi pelaku usaha dalam melaksanakan TJSP dan
3. Mengkoordinasikan dan mengsinergikan pelaksanan TJSP

Jadi tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan dan masyarakat tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah lokal dalam hak-hak dan kewajiban warga negara serta manajemen pembangunan dan pengembangan masyarakat, oleh karena itu aksi ini perlu dikoordinasikan antara perusahaan dengan pemerintah lokal dalam tata Kelola yang baik (good governance system). Aksi atau tanggung jawab sosial perusahaan setidaknya-tidaknya memfokuskan pada tiga isu dalam TJSP, yakni tatakelola perusahaan, lingkungan dan pengembangan masyarakat.

Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1956 (Lembaran Negara 25 Tahun 1956), Kabupaten Bengkalis dengan ibu kotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau.

Provinsi Riau itu sendiri termasuk salah satu provinsi paling kaya di Indonesia. Kekayaannya meliputi hasil pertambangan minyak bumi, batu bara, hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet hasil-hasil laut serta sungai, dan sebagainya. Sedangkan sumbangan provinsi Riau kepusat setiap tahunnya hamper mencapai jumlah 59,6 triliyun (Salam, Alfitra, 2001;13).

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang banyak di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang berdiri baik dari pertambangan minyak bumi, batu bara, hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet hasil-hasil laut serta sungai, dan sebagainya.

Daftar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 :Daftar Perusahaan TJSP di Kabupaten Bengkalis.

No	Nama Perusahaan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	ADEI PLANTATION and INDUSTRI	5.633.581.481,00		3.952.145.341
2	ARARA ABADI	337.554.620,00	1.261.607.040,00	499.548.580,00
3	BANK MEGA, TBK	3.996.000,00		
4	BANK NEGARA INDONESIA	25.000.000,00	36.500.000,00	125.000.000,00
5	BANK RIAU KEPRI	5.046.062.900,00	1.612.235.000,00	
6	BANK SYARIAH INDONESIA	115.000.000,00		
7	BANK MANDIRI			840.000,00
8	BESMINDO ANDALAS SEMESTA	7.720.000,00		
9	BESMINDO MATERI SEWATAMA	45.370.000,00	176.665.000,00	
10	BUKIT BATU HUTANI ALAM	708.576.486,00	801.846.400,00	1.463.912.900,00
11	DARMALI JAYA LESTARI	20.481.000,00	19.248.000,00	
12	EPSINDO JAYA PRATAMA			
13	GORA MANDAU SAWIT		39.460.000,00	
14	INTAN SEJATI ANDALAN	58.184.360,00	47.022.300,00	
15	MARITA MAKMUR JAYA	27.300.000,00	136.976.000,00	
16	MATRA UNIKATAMA	1.500.000,00		
17	MAXPOWER INDONESIA	3.480.000,00	7.700.000,00	

No	Nama Perusahaan	Tahun		
		2020	2021	2022
18	MESITECHMITRA PURNABANGUN	13.600.000,00		
19	MESKOM AGRO SARIMAS	127.331.200,00		
20	MURINI SAMSAM	328.369.230,00	72.030.414,00 48.936.815,00	147.873.548,00
21	MUSTIKA AGUNG SAWIT SEJAHTERA		155.500.000,00	
22	PERTAMINA	95.861.111,00		
23	PERTAMINA HULU ROKAN		1.714.816.200,00	
24	PERTAMINA (Kilang Pertamina Internasional)	1.525.000.000,00	1.175.000.000,00	
25	PIPAS MAS PUTIH	1.300.000,00		
26	PLN (Persero) UPDK PEKANBARU	100.000.000,00	165.000.000,00	150.000.000,00
27	RADIANT UTAMA INTERINSCO, TBK	9.475.000,00		
28	RIAU ABADI LESTARI	0,00	4.990.000,00	3.850.000,00
29	SATRIA PERKASA AGUNG	350.924.210,00	784.598.600,00	305.257.730,00
30	SEKATO PRATAMA MAKMUR	324.551.084,00		1.566.529.600,00
31	SIGMA ENERGI INDONESIA	31.500.000,00		
32	SUMATERA RIANG LESTARI	68.239.000,00		
33	SUPRACO INDONESIA			
34	SWADAYAABDI MANUNGGAL	10.000.000,00		
35	TRANSGASINDO		499.738.900,00	
36	UNICHEMCANDI INDONESIA	150.000,00	1.500.000,00	
	TOTAL	15.020.107.682,00	8.712.433.854,00	4.311.749.173,00

Sumber: Rekap Laporan TJSP Perusahaan Oleh Forum TJSP Kabupaten Bengkalis tahun 2022.

Dapat dilihat bahwa tidak semua perusahaan yang berada di Kabupaten Bengkalis melaksanakan dan melaporkan kegiatan TJSP perusahaan. Ada yang menjalankan kegiatan TJSP perusahaan ditahun 2022 dan ada yang tidak sama sekali menjalankan kegiatan TJSP perusahaannya. Hal ini di sebabkan karena belum adanya regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk berkoordinasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis.

Pada Peraturan Bupati Begkalis Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 Tantang Tanggung jawab Sosial Persuhaan pada BAB VII Pertanggung Jawaban Kegiatan pasal 20 dikatakan:

1. Pelaksana TJSP wajib menyampaikan laporan akhir kepada Sekretariat Forum TJSP
2. Laporan akhir pelaksanaan TJSP diserahkan paling lambat 2 (dua) minggu sejak berakhirnya kegiatan.
3. Selain laporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksana TJSP wajib menyampaikan laporan tahunan seluruh program TJSP yang dilaksanakan setiap tahunnya.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan selambat-lambatnya bulan januari setiap tahunnya.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada di Kabupaten Bengkalis belum semua melakukan kegiatan TJSP dan belum berkoordinasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Padahal sudah ada peraturan yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan TJSP kepada Forum TJSP.

Di Indonesia sendiri TJSP mulai berkembang sejak awal tahun 2000-an dan dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak Perusahaan di Indonesia yang menyadari pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kegiatan bisnis mereka. Dan salah satunya yaitu Perusahaan PT. Adei Plantation and Industry yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Berikut adalah Program-program TJSP PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplekdi tahun 2022.

Tabel 1. 2 : Realisasi TJSP PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

No	Bidang Program TJSP	Nilai	Keterangan
1	Bidang Pendidikan	86.937.000	Terlaksana
2	Bidang Kesehatan	69.559.500	Terlaksana
3	Bidang Olahraga	23.640.000	Terlaksana
4	Bidang Sosial dan Keagamaan	793.086.922	Terlaksana
5	Bidang Seni Budaya	114.330.000	Terlaksana
6	Bidang Lingkungan	18.989.849	Terlaksana
7	Bidang Infrastruktur	126.960.300	Terlaksana
8	Pemberdayaan Masyarakat	178.052.394	Terlaksana
9	Kemitraan dan Bina Lingkungan	2.540.589.376	Terlaksana
	TOTAL	3.952.145.341	Terlaksana

Sumber :Laporan TJSP PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Berdasarkan data yang ada di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa ada sekitar 9 Program dan kurang 194 kegiatan kegiatan TJSP yang dilaksanakan olehPT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek selama tahun 2022 priode Januari-Desember dari berbagai bidang seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Sosial dan Keagamaan, Infracstruktur, Lingkungan, Seni Budaya, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Semua program-program TJSP di atas adalah program-program yang dibuat oleh PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek untuk melaksanakan kewajiban TJSP dan permintaan bantuan dari masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Riau No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 9 Tahun 2009 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .

Dari 2 Kelurahan dan 7 Desa yang ada di wilayah perusahaan, perusahaan melakukan Koordinasi dengan pihak desa yaitu Kepala Desa untuk melaksanakan TJSP di Desa masing-masing seperti bantuan hewan Qurban, uang saku untuk siswa-siswi yang kurang mampu, pemberdayaan masyarakat, bantuan memperingati HUT RI dan lain-lain. Dan juga dari pihak desa juga mengajukan Proposal atau bantuan kepada Perusahaan seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan bantuan biaya turnamen keolahragaan dan lain-lain.

Setelah berkoordinasi dengan salah satu anggota Forum TJSP Kabupaten Bengkalis bahwa beberapa anggota Forum TJSP tidak mengetahui laporan TJSP PT. Adei, berdasarkan bukti pengiriman laporan TJSP PT. Adei tahun 2022 ke Bupati Bengkalis CQ Kepala Bappeda Bengkalis selaku Ketua Forum TJSP, PT. Adei telah melakukan pelaporan tersebut. Dengan demikian focus bukan hanya kepada perusahaan, melainkan lebih kepada perspektif koordinasi atau komunikasi terhadap program dan laporan TJSP yang dilakukan oleh PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek kepada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa Koordinasi PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek kepada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis terdapat banyak fenomena. Fenomena tersebut diantaranya :

1. Dalam laporan TJSP tahun 2022 PT. Adei Plantation and Industry belum melaporkan kegiatan TJSP tahun 2022 kepada Forum TJSP tapi pada kenyataannya PT. Adei Plantation and Industry telah melaporkan kegiatan TJSP tahun 2022.
2. Terjadinya Miskomunikasi di dalam susunan structural keanggotaan Forum TJSP Kabupaten Bengkalis, antara Kepala Bappeda selaku Ketua Forum TJSP dan anggota Forum, yang mana anggota Forum TJSP tidak mengetahui laporan TJSP PT. Adei Plantation and Industry

Tinjauan Pustaka

Koordinasi dan kinerja adalah dua konsep yang saling terkait, dan koordinasi terbaik hanya dapat dicapai melalui kinerja yang efektif. Kinerja karyawan merupakan bentuk komunikasi eksekutif yang membantu mencapai koordinasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil akhir kinerja adalah koordinasi yang efisien dan efektif.

Koordinasi dalam suatu organisasi merupakan suatu pengaturan yang bersifat proaktif bukan suatu pengaturan yang reaktif yang menetapkan aturan-aturan bagi seluruh tindakan, kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan dengan tanggung jawab, kewajiban dan wewenang yang saling terkait, suatu pengaturan yang dirancang untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan yang kacau dapat mengakibatkan pemborosan dan dampak buruk. moral dan ketertiban kerja.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-

pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi". Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).

Menurut Handayani (2002:54) yang dikutip oleh E.F.L. Brech dalam bukunya *Principles and Practice of Management*, koordinasi adalah penyeimbangan dan fasilitasi dengan menyediakan tempat yang sesuai bagi kegiatan kerja setiap orang dan menjamin agar kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara tepat dan harmonis dalam tim. . antar anggota, antar anggota.

Menurut Handayani (1985:88), koordinasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayani juga menyampaikan bahwa koordinasi dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi.

Menurut Handayani (1989:83) jenis koordinasi ada 2 (dua) yaitu: koordinasi intern dan koordinasi ekstern.

Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal.

- a. Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, terdapat hubungan hierarki antar koordinator struktural. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai koordinasi yang bersifat hierarkis, karena satu sama lain berada pada garis komando yang sama. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang kepala direktorat terhadap para kepala sub direktorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya.
- b. Koordinasi horizontal merupakan koordinasi fungsional, dan kedudukan koordinator serta orang yang dikoordinasikan berada pada tingkat eselon yang sama. Keduanya saling terkait dan memerlukan koordinasi berdasarkan tanggung jawab dan fungsinya. Misalnya, Sekretaris Biro Perencanaan Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Direktur Biro Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Paliaman.

Menurut Handayani (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

1. Komunikasi
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi

5. Kontinuitas Perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
 - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Tujuan koordinasi menurut Ndraha (2003:295), yaitu:

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan antar berbagai dependen organisasi.
2. Mencegah konflik dan meningkatkan efisiensi setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja dan sikap saling responsif-antisipatif di antara unit kerja interdependen dan di seluruh organisasi.
4. Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja.

Metode

Tipe yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan situasi dimana dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana koordinasi PT. Adei Plantation and Industry di Kabupaten Bengkalis. Pendeskripsian ini tidak hanya dilakukan untuk mengumpulkan data saja, akan tetapi juga melakukan analisis, dan mengamati fenomena yang sedang terjadi dilapangan

Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif karena peneliti menganggap metode ini lebih mudah disesuaikan dengan fonomena yang terjadi dilapangan, demikian pula penelitian kualitatif ini dapat membangun hubungan secara langsung antara peneliti dengan informan. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bukan berbentuk angka-angka melainkan data berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, catatan memo, dan dokumen pribadi lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil peneliti pada dimensi komunikasi, peneliti melihat tidak semua masyarakat tau tentang webset tanjak bermasa yang dibuat oleh forum TJSP akan tetapi untuk semua anggota forum TJSP dan PT. Adei Plantation and Industry sudah tau tentang webset tanjak bermasa ini. Hal ini membuktikan bahwa dalam berkoordinasi, PT. Adei Plantation and Industry dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Bengkalis memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan teori Handayani (1985: 88), dalam berkoordinasi terdapat indikator komunikasi. Komunikasi diukur dari adanya informasi, alur informasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Karena adanya berbagai informasi terkait pelaksanaan TJSP, alur informasi yang jelas melalui pertemuan langsung atau media serta menggunakan pemanfaatan Tanjak Bermasa oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan PT. Adei Plantation and Industry dalam berkoordinasi.

Berdasarkan hasil peneliti pada indikator kesadaran penting nya koordinasi, peneliti menemukan bahwa kedua instansi tersebut fokus terhadap tupoksi masing-masing. Dengan adanya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan TJSP, melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten

Bengkalis agar melaksanakan TJSP nya agar tepat sasaran dan berdampak berkelanjutan bagi masyarakat disekitar perusahaan.

Menurut teori oleh Handyaningrat (1985: 88), terdapat indikator kesadaran pentingnya koordinasi, item yang dinilai adalah tingkat pengetahuan pelaksanaan dan tingkat ketaatan. Menurut observasi oleh peneliti, dalam koordinasi yang dilakukan oleh PT. Adei Plantation and Industry dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, tingkat pengetahuan pelaksanaan sudah terlaksana akan tetapi karena tidak ada peraturan/regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk berkoordinasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tentang pelaksanaan TJSP ini merupakan kekurangan yang harus diperbaiki oleh pihak pemerintah agar memiliki peraturan/regulasi yang mewajibkan perusahaan berkoordinasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bukan hanya mengajak perusahaan-perusahaan untuk berkoordinasi.

Berdasarkan hasil peneliti pada indicator kompetensi partisipan, bahwa pastinya ada pejabat yang berwenang dalam pengkoordinasian TJSP di Kabupaten Begkalis, baik dari Bupati, Kepala Dinas dan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga berkoordinasi dengan berbagai dinas yang ada di Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan program atau kegiatan TJSP yang di lakukan oleh perusahaan. Ketika program atau kegiatan itu berbentuk program lingkungan maka Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan berkoordinasi dengan dinas Lingkungan Hidup. Semua bentuk dari dari kegiatan TJSP akan dikoordinasikan dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil peneliti pada indicator kesepakatan, komitmen dan insentif, kesepakatan yang dilakukan hanya sebatas saling berkomunikasi dan berbagi data kegiatan TJSP untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya sebelum berkoordinasi dilakukan, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan PT. Adei Plantation and Industry sudah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Tetapi dengan adanya koordinasi tentu nya juga mempermudah dalam pelaksanaan TJSP, karena pelaksanaan TJSP diharapkan dapat mendorong dan menumbuhkan percepatan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat tanpa menggunakan dana APBD.

Tidak ada insentif untuk perusahaan dari kerjasama tersebut, akantetapi diganti menjadi penghargaan atau TJSP award yang diberikan Forum Tanggung Sosial perusahaan kepada PT. Adei Plantation and Industry. Berdasarkan observasi peneliti, peneliti memang menemukan sertifikat TJSP Award yang diberikan Forum Tanggung Sosial perusahaan kepada PT. Adei Plantation and Industry.

Berdasarkan teori oleh Handyaningrat (1985: 88), indikator kesepakatan, komitmen dan insentif diukur dari adanya kesepakatan, adanya pelaksanaan kegiatan, sanksi, dan insentif. Dalam koordinasi ini, penilaian pada indikator ini cukup terlaksan, karena tidak adakesepakatan yang begitu mengikat karena kedua instansi hanya saling bertukar informasi dan melaksanakan tugas masing-masing, adanya pelaksanaan kegiatan oleh PT. Adei Plantation and Industry dan untuk sanksi PT. Adei Plantation and Industry tidak ada karena melaporkan kegiatan TJSP ke Forum Tanggung Sosial perusahaan dan insentif tidak karena digantikan dengan TJSP Award.

Berdasarkan hasil peneliti pada indicator kontinuitas perencanaan, program-program TJSP PT. Adei Plantation and Industry yang bersifat berkelanjutan itu ada seperti pemberdayaan masyarakat dan program kemitraan. Program ini diharapkan bisa membantu persoalan masyarakat disekitar wilayah perusahaan dan mendapat hal-hal positif kedepan

nya. Dan untuk hasil kesepakatan yang dilakukan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan PT. Adei Plantation and Industry selama ini tidak ada perubahan kesepakatan terkait pelaksanaan TJSP, akan tetapi untuk perubahan informasi terkadang ada tergantung apa kebutuhan masyarakat yang lebih dominan dan tepat sasaran.

Perencanaan pelaksanaan TJSP juga termasuk kedalam perencanaan jangka Panjang yang akan terus di evaluasi setiap tahun nya. Forum dengan perusahaan sangat berperan dalam pelaksanaan TJSP, masyarakat juga harus ikut dan mendukung upaya yang telah dilakukan pihak-pihak yang terlibat agar mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dalam upaya mendukung pencapaian dan percepatan pembangunan daerah tanpa menggunakan dana APBD.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Koordinasi PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Koordinasi PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis dilihat dari komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi dan kontinuitas perencanaan.

1. Komunikasi yang dilakukan PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis bisa dilihat dari pertemuan/rapat yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan pembuatan webset tanjak bermasa yang mempermudah dalam berkoordinasi antara PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis bisa dilihat dari PT. Adei Plantation and Industry sudah bergabung dengan Forum dan melakukan koordinasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.
3. Kompetensi partisipan PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis bisa dilihat dari adanya pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan TJSP dan terlibatnya Dinas PUPR terkait program-program TJSP yang bersifat pembangunan dan infrastruktur.
4. Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dalam Koordinasi PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari pelaksanaan TJSP PT. Adei Plantation and Industry di setiap tahun nya dari berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial, pemberdayaan masyarakat, bidang infrastruktur, olahraga dan kemitraan dan bina lingkungan. Dan insentif yang digantikan dengan pemberian penghargaan TJSP Award kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP.
5. Kontinuitas perencanaan Koordinasi PT. Adei Plantation and Industry Mandau Komplek dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bengkalis bisa dilihat dari program TJSP yang dilakukan oleh PT. Adei Plantation and Industry dibidang kemitraan yang bersifat berkelanjutan yang berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Daftar Pustaka

Ridho Oktaviandi dan Herman

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 / 2024

Buku dan Jurnal:

- E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handayaniingrat (2002:54)
- G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handayaniingrat (2002:55)
- Handayaniingrat, Soewarno. 1989. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1984. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Edisi Kedua*, BPFE:Yogyakarta.
- Harsono. 1998. *Coaching dan Aspek-aspek Psikologis dalam Coaching*. Jakarta: Depdikbud.
- Hasibuan (20016:85) *Koordinasi Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta
- Hasibuan, Melayu 2011. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara
- James. A.F. Stoner, dan R. Edward Freeman, *Management*, Edisi Kelima, Jakarta: Intermedia, Prentice Hall.
- Mas Agung Suharno, H. P. 1981. *Metodik Melatih Permainan Bolavoli*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- Phillips D. Allen dan Hornak James E. 1979. *Measurement and Physi-cal Education*. New York: John Wiley and Sons.
- Rivai, Veithzal dan Ahmad Fawzi Mohd Basri, 2005. *Performance Appraisal*. Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Sajoto.1988.*Penguatan dan Pembinaan Kondisi Fisik*. Semarang: IKIP Semarang.
- Tricahyo, (2009:6). Ibnu Tricahyo dala bukunya yang berjudul *Reformasi Pemilu Pt*. Remaja Rosdakarya
- Wedayanti M. D. 2018. *Manajemen Corporate Sosial Responsibility*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Jurnal

- Aman, A. G., & Satlita, L. (2018). Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(2), 162-175.
- Herman, H., Suriani, L., & Gultom, E. W. B. (2023). Efektivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 118-133.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*,

2(2).

- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-Faktor Ideal Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.

- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogია, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.

- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu

Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).

- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Putra, R. A., and Wicaksono, B. KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (TJSP) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 1-15.
- RIZA, F. (2022). PENGARUH EFEKTIFITAS TATAKELOLA DAN KINERJA KOORDINASI SERTA ENVIRONMENT ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (E-OCB) TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Sholihah, H. S. A. (2014). Peran Pemerintah Kabupaten Tuban Dalam Memfasilitasi Program Corporate Social Responbility (TJSP) PT Semen Indonesia Tahun 2013 (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., and Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi pemerintah dan swasta dalam program corporate social responsibility (TJSP) school improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 115-123.
- Wedayanti, M. D. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Pt. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 154-167.

Regulasi:

Ridho Oktaviandi dan Herman

Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 471/KPTS/VII/2021 Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Bengkalis.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseorangan Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Laporan TJSP PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY MANDAU KOMPLEK Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Rekap Perusahaan TJSP (CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY) di Kabupaten Bengkalis